

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA IGO KECAMATAN LOLODA UTARA KABUPATEN HALMAHERA UTARA

**SUSI YURLIAN SIBU
MASJE S. PANGKEY
JOORIE. M. RURU**

Abstract : The background of this study is that each village has difficulties or obstacles to be solved in order to achieve common goals. The constraints occur in various participation and the field of development planning, whether or not achieved the development of the quality of existing human resources. Therefore, the researcher focused on Community Participation in Development Planning in Igo Village, North Loloda Sub-district, North Halmahera District. The problems in this research are how the community participation, the efforts made and the results achieved in improving participation based on development planning in Igo Village. This research is a study of qualitative descriptions by taking the background of Igo Village. The purpose of this study was to decrypt the community participation in Igo Village. The data collection is done by observation, interview, and documentation. Data analysis is done by data collection, data reduction, data presentation then drawn conclusion.

The results of research using participatory methods in development planning in Igo Village begins with the government conveying the goals of development planning and motivating the community, presenting information, evaluating community participation. While the results of community participation in Igo Village experience a lack of improvement, this can be proven by the final evaluation of development planning that is in the category less than the maximum because the community is less participate in development planning. The improvement of the final evaluation result on community participation is inseparable from the role of the government that continues to invite, motivate, the community to participate in the development planning that the village or village government is proposing to the village.

Keywords: Participation, Planning, Development

PENDAHULUAN

Pada periode awal reformasi, pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi pembangunan. Daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Strategi pembangunan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat adanya keterlibatan langsung rakyat atau partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, kegiatan pembangunan partisipatif perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai akses pada sumberdaya ekonomi (sekaligus politik). Nampaknya tidak terlalu berlebihan apabila dinyatakan dalam medan perang melawan kemiskinan dan kesenjangan yang utama sesungguhnya berada di desa. Hal ini tidak saja menyampingkan pembangunan perkotaan melainkan ingin memberikan penekanan bahwa akses masyarakat desa pada sumber-sumber ekonomi sampai kini masih memprihatinkan. Dengan demikian usaha memberdayakan

masyarakat desa serta perang melawan kemiskinan dan kesenjangan di daerah pedesaan masih harus menjadi agenda penting dalam kegiatan pembangunan pada masa mendatang. Dan kegiatan pembangunan pedesaan masih relevan untuk ditempatkan sebagai prioritas kebijakan (Sunyoto Usman : 1998, 31).

Menurut Ginanjar Kartasasmita (1996:63), pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pandangan ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran. Dalam proses pembangunan, masyarakat tidak semata-mata diperlakukan sebagai obyek, tetapi lebih sebagai subyek dan aktor atau pelaku (Soetomo, 2008:8).

Pentingnya keterlibatan masyarakat didalam penyusunan perencanaan pembangunan sangat ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan partisipatif masyarakat terdapat pada 4 (empat) pasal

Undang-Undang ini yaitu pada Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Oleh karena itu, pemerintah desa Igo harus lebih transparansi lagi dalam setiap implementasi perencanaan pembangunan baik di bidang pembangunan jangka menengah maupun jangka tahunan agar masyarakat juga terlibat dalam memberikan aspirasi mereka dan turut mengambil bagian dalam proses pelaksanaannya. Karena dilihat dari kualitas kinerja pemerintah daerah dalam hal kerjasama dengan rakyat belum terlalu efisien sehingga menimbulkan banyak pro dan kontra terhadap suatu pembangunan yang ada di Desa Igo Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara. Para Kepala Desa dan anggota BPD sebagai pengelola pemerintahan desa, harus memahami arti penting perencanaan pembangunan partisipatif dan melaksanakan pola perencanaan tersebut dalam proses pembangunan di desa. Hal ini kiranya sangat penting, karena sesuai ketentuan pasal 1 angka 12 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Desa atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Seharusnya pemerintah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* (pemerintah yang baik) dan sebagai panutan untuk masyarakat desa harus lebih banyak memberikan ide-ide serta sumbangan gagasan untuk membenahi setiap masalah yang ada dalam desa, antara lain pemerintah lebih transparan dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, pemerintah desa Igo harus lebih transparansi lagi dalam setiap implementasi perencanaan pembangunan baik di bidang pembangunan jangka menengah maupun jangka tahunan agar masyarakat juga terlibat dalam

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Partisipasi Masyarakat

Ada dua persepsi partisipasi di Indonesia yang berbeda antara persepsi yang diartikan masyarakat dengan yang dipersepsikan pemerintah. Di Indonesia kata ini menjadi begitu sering digunakan siapapun sebagai strategi pembangunan dalam hampir setiap kesempatan, sehingga makna sebenarnya mulai kabur. Para aparat pemerintah mengartikan partisipasi

memberikan aspirasi mereka dan turut mengambil bagian dalam proses pelaksanaannya. Karena dilihat dari kualitas kinerja pemerintah daerah dalam hal kerjasama dengan rakyat belum terlalu efisien sehingga menimbulkan banyak pro dan kontra terhadap suatu pembangunan yang ada di Desa Igo Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara. Kepala Desa dan anggota BPD sebagai pengelola pemerintahan desa, harus memahami arti penting perencanaan pembangunan partisipatif dan melaksanakan pola perencanaan tersebut dalam proses pembangunan di desa. Hal ini kiranya sangat penting, karena sesuai ketentuan pasal 1 angka 12 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Desa atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Seharusnya pemerintah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* (pemerintah yang baik) dan sebagai panutan untuk masyarakat desa harus lebih banyak memberikan ide-ide serta sumbangan gagasan untuk membenahi setiap masalah yang ada dalam desa, antara lain pemerintah lebih transparan dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, dilihat dari permasalahan yang ada di desa Igo yaitu aparatur Desa Igo Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara yang mana pemerintah desa Igo harus lebih memperhatikan lagi masalah yang ada di desa Igo yakni : Kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, kurangnya partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, kurangnya partisipasi dalam pemantauan evaluasi pembangunan dan, kurangnya partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

sebagai kemauan rakyat untuk mendukung suatu program yang direncanakan dari atas, bukan dari rakyat sendiri.

Definisi tersebut pada dasarnya diartikan dengan istilah mobilisasi, sedangkan pengertian partisipasi menurut persepsi masyarakat mengandung suatu pengakuan, kreatif dan inisiatif dari rakyat sebagai modal dasar proses pelaksanaan pembangunan, dengan demikian masyarakat menciptakan pembangunan.

Menurut Sustrino (1995:222) ada dua pengertian partisipasi yakni :

Pertama, partisipasi adalah dukungan masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan tujuannya ditentukan perencana: Kedua, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pambanunan yang telah dicapai.

Menurut Solihin (2006), konsep partisipasi telah beralih dari sekedar kepedulian terhadap “penerima bantuan” atau “kaum tersisih” menuju ke suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, setidaknya ada tiga substansi yang perlu dicermati dalam suatu proses perencanaan partisipatif, yaitu :

B. Pengertian Perencanaan

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diurai beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apa yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan di masa depan (untuk masa depan). Dengan demikian, suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan. Mengapa suatu perencanaan perencanaan diperlukan?

Selain dari makna bahwa perencanaan adalah pemilihan alternative dan penentuan alokasi sumber daya, maka perencanaan dapat dibaca dari segi-segi lain, yakni (1) menyusun langkah-langkah untuk memastikan mencapai tujuan atau hal yang akan dicapai suatu rencana dengan demikian merupakan bagian dari usaha

1. Hak dan tindakan masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.
2. Ruang dan kapasitas masyarakat dalam mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik.
3. Kontrol masyarakat terhadap lingkungan dan komunitasnya maupun proses politik yang terkait dengan pemerintah.

Partisipasi berbasis pada “kesadaran individu untuk bertindak”. Kata “kesadaran” mengacu pada “proses internal” individu sebelum akhirnya ia memutuskan untuk (dan melakukan) tindakan. Pada titik terakhir ini ia mengalami proses transformasi dari “individu” menjadi “pelaku” atau “subyek”. Sementara “tindakan” menandakan bahwa ketika itu dilakukan sebenarnya individu tersebut telah menaruh “makna subyektif” pada “tindakan” itu. (Suryo Adi Pramono, 2004).

untuk mendapatkan hal yang diinginkan; (2) membuat suatu prediksi atau perkiraan mengenai hal-hal yang patut diduga dapat menghambat proses gerak, dan hal ini berarti bahwa perencanaan merupakan bagian dari tindakan antisipasi atas masa depan.

Dari berbagai dimensi pengertian dapat dikatakan bahwa suatu perencanaan tidak lain dari susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan dimasa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang saksama atas potensi dan faktor-faktor eksternal, dan pihak-pihak yang berkepentingan, dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian ini memuat hal-hal prinsip yang termuat dalam dokumen perencanaan, yakni (1) apa yang akan dilakukan, yang merupakan jabaran dari visi dan misi; (2) bagaimana mencapai hal tersebut; (3) siapa yang akan melakukan; (4) lokasi aktifitas; (5) kapan akan dilakukan, berapa lama, dan (6) sumber daya yang dibutuhkan. (Alexander Abe, 2005).

C. Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan

untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu Negara. Dalam pembangunan, peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku pembangunan dan pemerintah selaku pengayom, pembina dan pengarah sangat diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Upaya-upaya untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas, dalam pengertian sehari-hari seringkali disebut dengan upaya “pembangunan”.

Pembangunan merupakan segala upaya yang terus-menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Meskipun demikian, apapun maksud, tujuan, dan makna yang terkandung dalam pengertian yang dimaksudkan dalam satu istilah yang sama yaitu “pembangunan”, kesemuanya akan selalu merujuk pada sesuatu yang memiliki arah positif, lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kehidupan umat manusia secara individual maupun bagi masyarakatnya (Hadad, 1980).

Mengenai definisi tentang istilah pembangunan itu sendiri, Riyadi (1981) mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak, namun kesemuanya itu mengarah kepada ke suatu kesepakatan bahwa:

D. Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan Desa

Telaahan tentang pengertian “partisipasi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi atau peranserta, pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam (*intrinsik*) maupun dari luar (*ekstrinsik*) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup: pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta

Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu-hidup suatu masyarakat (dan individu-individu didalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.

Yang dimaksud dengan kesejahteraan disini, bukanlah sekedar terpenuhinya “kebutuhan pokok” yang terdiri dari pangan, sandang, dan perumahan atau pemukiman, tetapi Goulet (Todaro, 1981) mengemukakan sedikitnya tiga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu:

- a. Tercapainya *swasembada*, dalam arti kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar yang mencakup: pangan, sandang, perumahan/pemukiman, kesehatan, pendidikan-dasar, keamanan, rekreasi. Peningkatan harga diri, dalam arti berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri yang tidak tergantung kepada atau ditentukan oleh pihak lain, terlepas dari penindasan fisik maupun ideology, dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka.
- b. Diperolehnya suasana kebebasan, dalam arti adanya kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan dan untuk memilih alternatif-alternatif yang dapat dan boleh dilakukan untuk mewujudkan perbaikan mutu-hidup atau kesejahteraan yang terus-menerus bagi setiap individu sebagai warga masyarakat yang sedang membangun itu, tanpa adanya rasa takut dan tekanan dari pihak-pihak lain.

pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai. Karena itu, Yadav (UNAPDI, 1980) mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam: pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggrannya) selalu ditetapkan

sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di pihak lain, lapisan yang di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang-orang kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proporsional. Karena itu, partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang-tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

Di samping itu, yang sering dilupakan dalam pelaksanaan pembangunan adalah, partisipasi masyarakat dalam

pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati (tanpa penurunan kualitasnya) dalam jangka panjang.

3. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

4. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Setiap penelitian jelas harus menguraikan setiap jenis penelitian yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan melalui generalisasi yang menjelaskan suatu gejala atau kenyataan sosial yang berlangsung.

B. Lokasi Penelitian

(faisal, 1995:20). Maka bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini sebenarnya beragam, banyak ahli yang memberikan pengertian yang lebih luas yaitu segala macam bentuk penelitian kecuali penelitian histories dan eksperimental. Penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian (Suryabrata, 1987:19).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Desa Igo Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara.

C. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat pada pembangunan desa, mulai dari tahap pengambilan keputusan

D. Jenis Data

Jenis data penelitian yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan dan sekunder :

1. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh

E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Peneliti sebagai *human intrumen* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, memulai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiono, 2009:306).

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung kepada informan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

a. Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Menurut Supardi “Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki”.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan aktifitas dalam analisis meliputi tiga tahap yaitu: **Reduksi Data** (*data reduction*), meringkaskan data dengan orang, kejadian dan situasi dilokasi penelitian. Pada langkah pertama ini termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan. **Penyajian Data** (*data display*), pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi** (*conclusion*

perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan, sampai evaluasi pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan.

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2. Data sekunder adalah data yang diolah dan disajikan dalam bentuk dokumen, laporan dan lain-lain.

Oleh karena itu penentuan data (informan) yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik *purposive* atau pengambilan informan dengan sengaja (Sugiono (2009).

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Menurut Supardi metode wawancara adalah “proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan”.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti mengumpulkan dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012:240).

drawing/ verification), langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Desa

Desa Igo mayoritas beragama kristiani yang terdiri dari dua yaitu suku loloda dan sanger. Suku tersebut dengan satu kebersamaan yang istilah manatol atau yang di sebut dengan gotong royong, maksaira atau biasa di sebut dengan kumpul bersama.

Desa Igo terdiri dari 4 RT dan 2 RW dengan luas wilayah 1500 Km² yang terdiri dari

daratan 8,2 Km² (6,7%) dan lautan seluas 3 Km²(28, 1%) dengan batas Wilayah Desa sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pantai (Laut Bebas)
- Sebelah Selatan : Jere Tua dan Teru-Teru
- Sebelah Barat : Jere Tua
- Sebelah Timur : Teru-Teru

1. Topografi dan Iklim

Wilayah Desa Igo yang terletak dekat dengan pusat kota Kecamatan Loloda Utara sehingga menjadi pusat pemukiman sebagian besar penduduk berada di desa tersebut. Ketinggian wilayah Desa Igo berada pada 0 s/d 1Km diatas permukaan laut. Kondisi dan ekosistem hutan sebagian masih utuh dan sebagian masih difungsikan menjadi daerah pemukiman dengan tipe dataran rendah. Posisi Desa Igo yang berada pada daerah dataran dengan kemiringan lereng 0 s/d 15 % sehingga mempunyai jenis tanah podsolik merah kuning.

Desa Igo beriklim Tropis yang umumnya dipengaruhi oleh 2 musim yaitu barat atau utara dan musim timur atau tenggara, kedua musim ini berawal pada bulan Mei dan di pengaruhi oleh musim pancaroba yang merupakan transisi musim tersebut. Sedangkan musim barat atau musim utara pada umumnya berlangsung pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret, bulan April merupakan musim Transisi.

Desa Igo dipengaruhi oleh iklim tropis dengan curah hujan rata-rata 1000-2000 mm/Tahun musim hujan jatuh pada bulan Mei s/d Juni dengan curah hujan 10-15 hari dan curah hujan terendah pada bulan Desember (7 mm) dengan jumlah hari hujan 4 s/d 8 hari.

2. Kondisi Hidrologi

Wilayah Desa Igo memiliki pantai yang datar dengan kedalaman mencapai antara 100-300 meter.

Pasang surut yang terjadi di Desa Igo adalah tipe pasut diurnal yaitu mengalami 2 kali pasang dan 2 kali surut pada interval waktu yang sama, pergerakan arus menurut skala waktu akibat perubahan musim yaitu barat dan timur dan arus harian yang dipengaruhi oleh pergerakan pasang surut.

3. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan pada Desa Igo merupakan manifestasi hubungan antara manusia dengan lingkungan, polarisasi dan intensitas penggunaan lahan tersebut juga merupakan indikator yang mencerminkan aktifitas utama dalam tingkat penguasaan teknologi penduduk dalam mengeksploitasi sumber daya lahan sekaligus mencerminkan karakteristik potensi wilayah desa.

B. Pembagian Wilayah Desa Igo Kec.Loloda Utara, Kab. Halmahera Utara

Wilayah Desa Igo terdiri dari 04 (Empat) RT, yaitu RT, 01, 02, 03, dan 04, masing-masing dipimpin oleh seorang ketua RT. Desa induk merupakan desa yang dihuni oleh warga asli suku Igo namun sebagian ada juga yang merupakan pendatang yang berasal dari berbagai suku loloda. Areal hutan terletak disebelah barat sedangkan wilayah lainnya merupakan perkebunan dan pertanian yang dikuasai oleh warga masyarakat setempat pada umumnya mereka bekerja sebagai petani dan nelayan.

B. Pembahasan

Pada prinsipnya pembangunan dilakukan oleh masyarakat desa semata-mata untuk masyarakat desa itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat desa. Dengan demikian maka dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dibutuhkan partisipasi masyarakat, karena sebagian dari partisipasi masyarakat sangat penting dalam keberlangsungan pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya masih banyak lagi yang harus diperbaiki baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat mengingat beberapa persoalan di antaranya pemerintah kurang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan sehingganya hal itu memicu masyarakat kurang melibatkan diri dari setiap program yang akan di jalankan di dalam desa, seharusnya memang ada timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat untuk ketercapaian program pembangunan.

Kemudian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan didesa sangatlah penting karena partisipasi pada pelaksanaan kegiatan pembangunan itu yang nantinya untuk

menentukan arah dan pola jalannya pembangunan masyarakat desa yang lebih khususnya didesa Igo. Padahal seringkali masyarakat sasaran justru tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan menjadi sia-sia.

Disamping itu juga partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai dari apa yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Karena memang sampai sejauh ini partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi di desa Igo masih terbilang tidak baik dengan berbagai kendala yang ditemui dilapangan dengan salah satu alasan pemerintah yaitu program pembangunan yang akan dijalankan didesa Igo sudah merupakan program yang diprioritaskan dari pemerintah pusat itu sendiri sehingga masyarakat tidak turut dalam pengambilan keputusan apalagi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Hal ini sesuai dengan jawaban atau hasil wawancara dari masyarakat setempat atas nama Ibu Tina Mamonto yang mengatakan bahwa:

“masyarakat tidak selalu dilibatkan dalam partisipasi perencanaan pembangunan karena menurut kepala desa pembangunan yang akan dijalankan di desa Igo sudah merupakan pembangunan yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat itu sendiri. Jadi pada pernyataan Ibu Tina Mamonto peneliti sedikit menyimpulkan bahwa memang melihat serta mendengar penjelasan tersebut, titik dari pada kurangnya partisipasi masyarakat itu bukan semata terdapat pada pribadi mereka akan tetapi pemerintah itu sendiri yang memang pada dasarnya kurang melibatkan mereka, sehingganya jangan heran apa bila partisipasi masyarakat dalam desa kurang berjalan seperti yang diharapkan oleh pemerintah desa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dikemukakan kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Desa dapat menghambat peningkatan perencanaan pembangunan dalam Desa tersebut, sehingganya jangan heran dalam Desa tersebut banyak tantangan antara pemerintah Desa dengan keinginan masyarakat yang belum terealisasi sampai dengan saat ini. Beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan dimasing-masing desa belum dilaksanakan, diantaranya tahapan persiapan dan tahapan pembahasan kegiatan/penetapan keputusan kegiatan yang akan disampaikan ketingkat musrenbang.
2. Legalitas perencanaan, dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, menjunjung tinggi etika dan tata nilai masyarakat. Unsur legalitas belum dilakukan dengan baik karena ada beberapa tahapan dalam petunjuk teknik musrenbang yang belum dilaksanakan dengan baik dalam proses perencanaan pembangunan ditingkat desa.
3. Faktor-faktor penghambat dalam proses partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan yang ada di desa Igo Kecamatan Loloda Utara. Yakni kurangnya keaktifan masyarakat dalam memberikan masukan dan juga kurangnya perhatian dari pemerintah tentang pentingnya partisipasi.

A. SARAN

Sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di Desa Igo Kec.Loloda Utara Kab. Halmahera Utara, Penulis Mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Perlu ada peningkatan pemahaman perangkat desa, unsur pembangunan dan unsur masyarakat mengenai mekanisme perencanaan pembangunan, pentingnya perencanaan pembangunan melalui kegiatan pelatihan atau penambahan wawasan pendekatan yang aktif melalui kader pembangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Pihak pemerintah Desa Igo Kec. Loloda Utara Kab. Halmahera Utara. Harus senantiasa turut mengaktifkan masyarakat Desa Igo dalam berpartisipasi pada perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa tersebut.
3. Untuk masyarakat Desa Igo, disarankan agar senantiasa memiliki usaha dalam berpartisipasi pada setiap perencanaan pembangunan yang di adakan pemerintah desa maupun pemerintah pusat, karena mengingat akan kemajuan desa tersebut dengan melihat hasil dari pada pembangunan yang ada dalam desa, sehingganya di butuhkan partisipasi serta kerja sama yang baik antara masyarakat deng pemerintah Desa Igo Kec.Loloda Utara Kab.Halmahera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe. A. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pembaruan
- Aprilia. T. NTP. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Penerbit Afabeta.
- GINANJAR. K. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataa*. Jakarta: Pustaka Cidessindo.
- Krisnha. S. S.2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Penerbit Afabeta.
- Miles. M. B. and Huberman. M. A. 1984. *Qualitative Data Analyisi*. London: Sage Publication
- Prima G. P. N. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Penerbit Afabeta.
- Sondang. P. S. 2007, *Manajemen Sumber Manusia*, Jakarta: Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas, Penerbit Bumi Aksara.

Soetomo. 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Solihin D. 2006. “*Perencanaan Pembangunan Partisipatif*”. Jakarta: Sekolah Tinggi Pemerintahan Abdi Negara.

Sugiono. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sutrisno. L. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.

Totok. M. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Penerbit Afabeta.

Usman. S. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahyudin. K. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Vol 1 Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.

Yayuk. Y. Dan Mangku. P. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama

Yadav. U. 1980. *Local Level Planning and Rular Development*. New delhi: Concept Publishing Company
Kamus Bahasa Indonesia Tahun 2005

Sumber Lain:

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa